

**SKRIPSI**

**PERAN KELURAHAN DALAM PROGRAM BANTUAN  
SOSIAL DI KELURAHAN SUNGAI SELAYUR  
KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG**



**Disusun Oleh:**

**EVI MAYANG SARI  
07021182025011**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

# **SKRIPSI**

## **PERAN KELURAHAN DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN SUNGAI SELAYUR KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Sosiologi (S.Sos)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



**Disusun Oleh:**

**EVI MAYANG SARI  
07021182025011**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**“PERAN KELURAHAN DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI  
KELURAHAN SUNGAI SELAYUR KECAMATAN KALIDONI KOTA  
PALEMBANG”**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh Derajat  
Sarjana S-1**

Diusulkan oleh:

**EVI MAYANG SARI**

**07021182025011**

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal



Dr. Yoyok Hendarso, M.A  
NIP. 196006251985031005

.....

17 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si  
NIP. 198002112003122003

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### “PERAN KELURAHAN DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN SUNGAI SELAYUR KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG”

Skripsi

**EVI MAYANG SARI**

**07021182025011**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 14 juni 2024

Pembimbing:

Dr. Yoyok Hendarso M. A  
NIP 196006251985031005

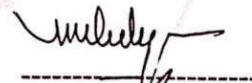
Tanda Tangan



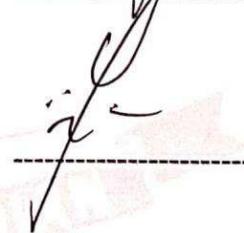
Penguji:

1. Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si.  
NIP. 19591024 198503 2 002

Tanda Tangan



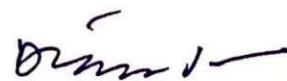
2. Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos.  
NIP. 199206062019032025



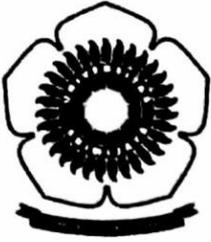
Mengetahui,



Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si  
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662 Telepon (0711)  
580572 ; Faksimile (080572)

## PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Mayang Sari

NIM : 07021182025011

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang saya buat berjudul “Peran Kelurahan dalam Program Bantuan Sosial di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 28 Mei 2024

Yang buat pernyataan,

  
SPULUR RIBU KUTIPAN  
22  
METERAI  
TEMPEL  
7AALX210058890

Evi Mayang Sari

07021182025011

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berproses lambat belum tentu gagal, tergesa gesa juga tidak menjanjikan berhasil. Intinya jangan berhenti, tekuni saja Perbanyak Usaha dan Doa yang terpenting yakin Bahwa Tuhan akan selalu bersama mereka yang mau berusaha”

Dengan rasa syukur dan atas berkat ridho Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Zarnadi dan Ibu Sriwahyuni
2. Semua keluarga saya tercinta
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yoyok Hendarso. M. A
4. Teman-teman seperjuangan di Universitas Sriwijaya dan Almamater yang saya banggakan

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Kelurahan dalam Program Bantuan Sosial di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang” .Sholawat berangkaikan salam hendaknya selalu tcurahkan untuk Baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang penuh dengan kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar S-1 Sosiologi (S.Sos) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan dan proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dukungan serta juga semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos, MA selaku sekretaris jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Yoyok Hendarso, MA selaku pembimbing skripsi penulis yang sudah dengan sangat baik membimbing penulis hingga selesai nya skripsi ini.

6. Ibu Merry Yanti, S. Sos., MA selaku pembimbing akademik penulis yang selalu senantiasa memberikan arahan dan motivasi tentang akademik pada penulis.
7. Seluruh dosen sosiologi dan staff serta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Zarnadi dan Ibu Sriwahyuni yang berperan penting di dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan doa serta usaha terbaik nya sampai saat ini sehingga penulis mampu untuk berkuliah di Universitas Sriwijaya kampus yang menjadi impian orang tua Penulis di masa remaja kini penulis sebagai anak mampu menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi ini dengan baik. Berkat Usaha dan doa dari Orang tua Penulis yang tidak pernah henti.
9. Kepada seluruh keluarga penulis saudari, keponakan, kakak ipar, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang sudah di berikan kepada penulis
10. Kepada Alm Nenek Huriah Binti Ishak Djubidi yang sangat penulis sayang dan cintai, sudah banyak membantu penulis selama berkuliah,dan selalu memberikan semangat serta keyakinan kepada penulis untuk terus maju dan sukses kedepan nya
11. Untuk sahabat kecil yang tidak bisa penulis sebut kan satu persatu, yang sudah menjadi salah satu penyemangat penulis dalam proses penulisan skripsi ini .
12. Kepada Teman terdekat penulis yang sudah banyak memberi dukungan, motivasi, waktu serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
13. Kepada Sahabat Sahabat Penulis yang penulis sayang yang sudah memberi Motivasi yang luar biasa untuk penulis dan membantu Penulis di dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Kepada Seluruh Informan yang sudah bersedia membantu memberikan informasi yang di butuhkan oleh penulis selama proses penyelesaian Skripsi

15. Kepada teman-teman jurusan Sosiologi angkatan 2020 yang telah  
membersamai dari awal perkuliahan

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena masih terbatasnya ilmu dan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan demikian penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi penulis maupun pembaca.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 27 Mei 2024  
Penulis

EVI MAYANG SARI  
07021182025011

## RINGKASAN

### PERAN KELURAHAN DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN SUNGAI SELAYUR KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG

Kemiskinan adalah kunci utama adanya program bantuan sosial untuk itu pemerintah menciptakan Bantuan sosial dimana Ini adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah pusat kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi adanya resiko sosial. Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat memerlukan Peran Kelurahan dalam sukses nya Program Bantuan Sosial. Untuk itu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Peran Kelurahan dalam Program Bantuan Sosial di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan Bagaimana Bentuk Bantuan Sosial yang ada di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Teori Peran dari Jim Ife & Frank Tesoriero (2014). Metode Penelitian yang gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Data di peroleh melalui Observasi 6 Informan Utama dan 5 Informan pendukung melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjunkan Peran yang di berikan oleh Kelurahan di dalam program Bantuan Sosial yaitu sebagai tempat pemberi Informasi (Peran Edukasi) dan Peran Teknis (Pengelola Data Bantuan Sosial). Bentuk Bantuan Sosial yang di terima oleh Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dari pemerintah Pusat fokus kepada 3 Bantuan Sosial yaitu Bpnt (Bantuan Pangan Non Tunai), Kis (Kartu Indonesia Sehat) dan Pkh (Program Keluarga Harapan), Ketiga Bantuan Sosial ini memiliki syarat penerima Bantuan Sosial yang sama yaitu kepada masyarakat miskin.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Sosial, Kelurahan**

Indralaya, 15 Juni 2024

Disetujui oleh,  
Pembimbing



Dr. Yoyok Hendarso, M.A  
NIP. 196006251985031005

Ketua Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si  
NIP. 198002112003122003

*SUMMARY*

**THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL AID PROGRAM IN THE SUNGAI SELAYUR DISTRICT, KALIDONI DISTRICT, PALEMBANG CITY**

Poverty is the main key to the existence of social assistance programs for which the government creates social assistance which is the provision of assistance in the form of money/goods from the central government to individuals, families, groups and/or communities which is not continuous and selective in nature which aims to protect against risks. social. The Social Assistance Program from the Central Government requires the role of Subdistricts in the success of the Social Assistance Program. For this reason, the aim of this research is to find out the role of sub-districts in the social assistance program in Sungai Selayur sub-district, Kalidoni sub-district, Palembang city and what forms of social assistance exist in Sungai Selayur sub-district, Kalidoni sub-district, Palembang city. The theory used in this research is the Role Theory from Jim Ife & Frank Tesoriero (2014). The research method used is a descriptive qualitative research method with a case study research strategy. Data was obtained through observations of 6 main informants and 5 supporting informants through interviews and documentation. The results of this research show the role given by the Subdistrict in the Social Assistance program, namely as a place to provide information (Educational Role) and Technical Role (Social Assistance Data Manager). The form of Social Assistance received by the Sungai Selayur Subdistrict, Kalidoni District, Palembang City from the government The center focuses on 3 Social Assistance, namely Bpnt (Non-Cash Food Assistance), Kis (Healthy Indonesia Card) and Pkh (Family Hope Program). These three Social Assistance have the same conditions for receiving Social Assistance, namely the poor.

**Keywords: Poverty, Social Assistance, Village**

*Indralaya, 15 Juni 2024*

*Approved by,  
Advisor*



**Dr. Yoyok Hendarso, M.A**

*Head of Departement of Sociology*

*Faculty of Social and Political  
Sriwijaya University*



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>8</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>10</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>14</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.3    Tujuan Penelitian.....	12
1.4    Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>14</b>
1.1    Tinjauan Pustaka .....	14
2.1    Kerangka Pemikiran .....	26
2.2.1    Peran.....	26
2.2.2    Teori Peran .....	33
2.2.4    Bagan Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1    Desain Penelitian .....	38
3.2    Lokasi Penelitian .....	38
3.3    Strategi Penelitian.....	38
3.4    Fokus Penelitian .....	39
3.5    Jenis dan Sumber Data .....	39
3.6    Penentuan Informan.....	42
3.7    Peranan Peneliti .....	42
3.8    Unit Analisis Data .....	44
3.9    Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.10    Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	52
3.11    Teknis Analisis Data.....	52

3.12	Jadwal Penelitian .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>
4.1	Gambaran Umum Kelurahan Sungai Selayur.....	57
4.2	Gambaran Umum Informan .....	61
4.3	Informan Pendukung .....	65
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>.....</b>	<b>68</b>
5.1	Bentuk Program Bantuan Sosial Di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang .....	68
5.2	Peran Kelurahan Dalam Program Bantuan Sosial Di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang .....	78
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>.....</b>	<b>82</b>
6.1	Kesimpulan .....	82
6.2	Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>112</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022– Maret 2023 .....	3
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelami .....	39
Tabel 4. 2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sungai Selayur .....	39
Tabel 4. 3 Fasilitas Kesehatan Kelurahan Sungai Selayur.....	39
Tabel 4. 4 Fasilitas Keagamaan di Kelurahan Sungai Selayur .....	40
Tabel 4. 5 Informan Utama .....	40
Tabel 4. 6 Data Informan Pendukung .....	42

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	26
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia saat ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, terutama dalam situasi sulit seperti pandemi atau bencana alam. Berikut adalah beberapa jenis Bansos yang disediakan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai dengan syarat-syarat tertentu, seperti persyaratan anak-anak untuk bersekolah dan ibu hamil untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan sembako berupa kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan makanan pokok di e-warong.
3. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS): Program asuransi kesehatan yang menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Tujuan dari Bansos ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, serta mempercepat pemulihan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

Bansos, atau bantuan sosial, menjadi sorotan publik karena pentingnya dalam mendukung upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, dan mempertimbangkan aspek politik dalam skala luas. Permendagri Nomor 32 tahun 2011 mengatur bahwa Bansos adalah bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang tidak bersifat terus-menerus dan selektif, dengan tujuan melindungi dari risiko sosial.

rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah”

Bantuan sosial tidak boleh diberikan pada setiap tahun anggaran, walaupun ada yang diberikan secara terus-menerus, itu ada sebab lain, misalnya supaya penerima bantuan bebas dari resiko sosial. Untuk mengatasi masalah ini, maka disusun Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Kemiskinan masih menjadi topik utama pembangunan ekonomi oleh semua negara di dunia baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah masalah pembangunan ekonomi dimana masih terdapat masyarakat kurang mampu, tidak sejahtera, tidak sekolah, tidak sehat, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, dan tidak bebas dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Indonesia sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu isu besar di dalam perekonomian Indonesia, seolah-olah menjadi “pekerjaan rumah” yang belum dapat terselesaikan (Prasetyoningrum, 2018). Kemiskinan tidak selamanya hanya karenapendapatan yang rendah saja.

Kerumitan masalah kemiskinan ini juga menggambarkan penderitaan dan tertekannya harga diri manusia karena kekurangan pendapatan, kontrol, dan pilihan untuk memulihkan taraf hidupnya. Kemiskinan sama dengan keterbatasan, dalam keterbatasan tersebut seseorang akan sulit untuk memperoleh kebutuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu Negara (Minggu, 2019).

Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Permendagri Nomor 32 tahun 2011, yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012, menetapkan bahwa untuk menerima bantuan sosial dari APBD, anggota masyarakat harus mengajukan usulan tertulis kepada kepala daerah. Kepala daerah kemudian menugaskan SKPD terkait untuk mengevaluasi usulan tersebut. Hasil evaluasi oleh Kepala SKPD berupa rekomendasi disampaikan kepada kepala daerah melalui TAPD. Selanjutnya, TAPD memberikan pertimbangan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan sosial tidak selalu diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam kasus tertentu seperti untuk mengurangi risiko sosial bagi penerima manfaat. Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran, serta Buletin Teknis Nomor 10 tahun 2011 yang mengatur pengungkapan belanja bansos dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyaluran bansos merupakan kewenangan administratif Pemda masing-masing. Namun, perbedaan pedoman yang digunakan oleh setiap daerah dalam pengelolaan belanja bansos dapat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing Pemda. Meskipun belum ada penelitian khusus yang membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja bansos, beberapa penelitian mengindikasikan adanya hubungan antara karakteristik organisasi dengan kebijakan, kinerja, dan transparansi pengungkapan secara umum. Proposal dari masyarakat, individu, keluarga, kelompok, LSM, atau lembaga non-pemerintahan harus disusun dalam bentuk tertulis untuk diajukan kepada gubernur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, mengurangi risiko kerentanan sosial, dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan ini

ditujukan bagi mereka yang tidak memiliki sumber mata pencaharian, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar, atau sedang dalam proses rehabilitasi sosial.

Pemerintah daerah diizinkan memberikan bantuan sosial (Bansos) setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Penerima Bansos termasuk masyarakat yang terdampak krisis ekonomi, sosial, politik, dan bencana alam, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bantuan juga dapat diberikan kepada LSM yang aktif dalam bidang pendidikan, keagamaan, atau perlindungan sosial.

Kriteria penerima Bansos mencakup berdomisili di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dan memiliki identitas yang jelas. Tujuan Bansos mencakup penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan penanggulangan bencana. Dana Bansos dialokasikan untuk memberikan bantuan uang atau barang kepada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan mereka secara selektif dengan penggunaan anggaran yang transparan.

Program bantuan sosial diperlukan pemerintah sebagai respons terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berkontribusi pada peningkatan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat miskin memperbaiki kehidupan mereka secara bertahap melalui bantuan makanan, pendidikan, kesehatan, dan upaya lainnya. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pemerintah Indonesia.

Bantuan sosial rentan terhadap penyimpangan karena terkait langsung dengan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Permasalahan muncul karena kurangnya batasan yang jelas dalam pengeluaran dana ini. Secara umum, bantuan sosial mencakup segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya tersebut sering kali dianggap sebagai pengeluaran bantuan sosial.

Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial menghadapi berbagai masalah, seperti penyimpangan dalam penyaluran di bidang pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Untuk mengurangi potensi penyimpangan, penulis mengacu

pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945 Pasal 33 dan 34, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum guna mewujudkan keadilan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut PMK Nomor 181 tahun 2012, bantuan sosial (Bansos) mencakup transfer uang, barang, atau jasa dari pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat untuk mengurangi risiko sosial, meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian, pemberian bansos belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Penelitian menunjukkan bahwa di negara berpenghasilan rendah yang sedang bertransisi, manfaat dari bansos seringkali terbatas, dengan sebagian kecil masyarakat miskin yang mendapatkan manfaat tersebut. Selain itu, desain program bansos tidak selalu ditujukan secara spesifik untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, dan situasi ekonomi yang sedang berubah sulit bagi pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial (bansos) memiliki sejumlah keuntungan penting bagi penerima dan masyarakat secara umum:

- 1 Pengurangan Kemiskinan : Bansos membantu menurunkan tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, seperti keluarga miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- 2 Stimulasi Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi: Penerima bansos cenderung mengalokasikan dana tersebut untuk membeli barang dan jasa yang mendukung ekonomi lokal, yang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor seperti perdagangan dan manufaktur kecil.
- 3 Peningkatan Kesejahteraan Sosial : Selain memengaruhi kesejahteraan materi, bantuan sosial juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penerima, mengurangi tekanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

- 4 Penanganan Krisis Sosial: Saat terjadi krisis ekonomi atau bencana alam, bansos memberikan jaring pengaman sosial yang penting untuk membantu individu dan keluarga mendapatkan kebutuhan dasar mereka.
- 5 Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Program bansos sering mencakup bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dan subsidi kesehatan bagi keluarga yang memerlukan, yang berkontribusi pada peningkatan akses terhadap layanan-layanan penting ini.
- 6 Peningkatan Kapasitas Ekonomi : Melalui program bantuan yang tepat sasaran dan pendampingan modal usaha, bansos membantu meningkatkan kapasitas ekonomi penerima untuk mandiri secara finansial di masa depan.

Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu penerima, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.

Di Indonesia, hubungan antara kemiskinan dan bantuan sosial sangat erat dan krusial. Berikut beberapa poin yang menjelaskan keterkaitan ini:

- 1 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem : Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Sembako menjadi instrumen utama pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia. Program-program ini memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2 Pengurangan Kemiskinan Multidimensi : Selain memperbaiki aspek ekonomi, bantuan sosial juga bertujuan untuk mengatasi dimensi lain dari kemiskinan, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai. Program-program ini membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penerima dan membuka peluang bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
- 3 Peran Bantuan Sosial dalam Pembangunan Manusia : Dengan menyasar bantuan secara tepat, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat yang kurang mampu. Hal ini tidak hanya

memberikan manfaat jangka pendek dalam menanggulangi kebutuhan mendesak, tetapi juga berdampak positif dalam pembangunan manusia jangka panjang.

- 4 Tanggapan terhadap Krisis Ekonomi dan Bencana Alam : Bantuan sosial memiliki peran vital dalam menanggapi krisis ekonomi yang mempengaruhi kelompok masyarakat rentan serta bencana alam yang mengancam sumber daya dan kehidupan mereka. Bantuan ini memberikan jaring pengaman sosial yang sangat diperlukan agar individu dan keluarga yang terdampak dapat bertahan dan pulih dari dampak yang mereka alami.
- 5 Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Bantuan sosial juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mengakhiri segala bentuk kemiskinan (SDG 1) dan meningkatkan kesejahteraan (SDG 3 dan SDG 4).

Secara keseluruhan, bantuan sosial di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan sehari-hari dan pendapatan (Todaro dan Smith, 2006:231; Kuncoro, 2003:101). Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 terdapat 27,54 juta orang miskin di Indonesia, yang menyebabkan tingkat kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi nasional. Angka ini naik 0,36% dari tahun sebelumnya atau sekitar 1,12 juta orang (Itang Itang, 2015). Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program sosial, termasuk bantuan sosial sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009, yang diberikan melalui berbagai instansi untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka (Riyadi, 2015). Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka secara

sementara. Jenis-jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Penelitian lain menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam belanja pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun berbagai kategori belanja pemerintah penting, layanan sosial dianggap krusial untuk meningkatkan potensi penghasilan masyarakat miskin, termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri telah menggunakan bansos sebagai strategi untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Meskipun anggaran untuk bansos terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengurangan kemiskinan melambat dan kesenjangan pendapatan masih tinggi. Data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan banyak yang sangat rentan terhadap kemiskinan kembali jika menghadapi guncangan ekonomi atau bencana alam. Hasil observasi awal pada 07 Agustus 2023 menunjukkan bahwa di Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, masyarakat menghadapi berbagai masalah ekonomi akibat program bantuan sosial. Program ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sumber ketergantungan karena harapan mereka bahwa bantuan sosial dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal sebenarnya bertujuan hanya sebagai bantuan. Namun, ada juga yang menggunakan bantuan sosial dengan bijak sesuai fungsinya. Kelurahan tersebut mayoritas dihuni oleh masyarakat yang miskin dan pemerintah berharap bantuan sosial dapat mengurangi kesulitan ekonomi mereka. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi juga di kota/kecamatan kecil. Kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks, dan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan serta mengidentifikasi penyebabnya tetap menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional.

Kemiskinan yang dinamis dan tetap merupakan bentuk kemiskinan multidimensi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian empiris menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan, kondisi perumahan, dan pekerjaan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan (Jacobus, 2019). Kemiskinan bisa disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup individu dan produktivitas masyarakat. Hal ini merujuk pada keadaan di mana

individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena pendapatan yang rendah, menghambat kemudahan dan kemakmuran mereka. Kemiskinan tetap menjadi isu krusial dalam perekonomian, sebagai masalah multidimensi yang memerlukan penanganan yang lebih dari sekadar masalah dasar seperti hubungan sebab-akibat, melibatkan juga preferensi, nilai, dan politik (Sholeh, 2010). Suatu negara dikatakan sejahtera apabila berhasil mengatasi kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Kegagalan dalam hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah atau organisasi publik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Bastian, 2016).

Secara umum, dari September 2012 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode-periode tersebut umumnya terkait dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, serta pembatasan mobilitas penduduk selama pandemi Covid-19 di Maret dan September 2020.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun 0,46 juta orang dibandingkan dengan September 2022, dan 0,26 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar - Pada bulan September 2022, tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,36 persen, mengalami penurunan sebesar 0,21 poin dari bulan sebelumnya dan 0,18 poin dari bulan Maret 2022. Dalam rentang waktu September 2022 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,24 juta orang, sementara di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,22 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan menurun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen, sementara di perdesaan menurun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022– Maret 2023

<b>Daerah/Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2022	11,82	7,50
September 2022	11,98	7,53
Maret 2023	11,74	7,29
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2022	14,34	12,29
September 2022	14,38	12,36
Maret 2023	14,16	12,22
<b>Total</b>		
Maret 2022	26,16	9,54
September 2022	26,36	9,57
Maret 2023	25,90	9,36

*Sumber: Di olah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023*

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aspek ekonomi, sosial, dan geografis. Meskipun pemerintah telah berupaya mengurangi tingkat kemiskinan, tantangan ini tetap menjadi fokus utama.

**Definisi Kemiskinan:**

**Garis Kemiskinan:** Pemerintah Indonesia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan nilai uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

**Dimensi Kemiskinan:** Selain dari segi ekonomi, kemiskinan juga melibatkan dimensi sosial seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan pendapatan

tetap menjadi isu yang signifikan, terutama di beberapa daerah dan kelompok masyarakat tertentu.

#### Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia:

**Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata:** Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata telah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta di antara berbagai kelompok masyarakat.

Perbedaan sosial ekonomi di Indonesia memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat sering kali menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Kendala infrastruktur dasar seperti akses terhadap jalan, listrik, dan air bersih juga mempengaruhi produktivitas dan menaikkan biaya hidup. Bencana alam sering kali menyebabkan kerusakan infrastruktur dan merugikan perekonomian, memperburuk kondisi kemiskinan. Perubahan iklim juga berdampak pada sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat miskin di pedesaan.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur desa.

Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Tantangan tersebut termasuk jumlah penduduk yang besar, perubahan struktur ekonomi yang kompleks, serta ketimpangan regional antara daerah kaya dan miskin. Solusi untuk masalah kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. mengatasi masalah ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1 Bagaimana bentuk program bantuan sosial di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang?
- 2 Bagaimana peran Kelurahan dalam program Bantuan Sosial di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk menganalisis Peran Kelurahan dalam Program Bantuan Sosial yang ada di kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis bentuk -bentuk Program Bantua Sosial yang telah di berikan oleh pemerintah pusat kepada Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritik**

Hasil penelitian Ini di harapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam bidang Ekonomi Sosial dengan melihat Peran Kelurahan dalam Program Bantuan Sosial yang ada di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1 Bagi Pemerintah**

Sebagai salah satu bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palembang dalam pengambilan kebijakan terutama dalam menentukan langkah-langkah yang perlu di ambil berkenaan dengan persoalan Pembagian Program Bantuan sosial (Bansos).

#### **2 Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang Bentuk Program Bantuan apa saja yang ada di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan serta menjadi acuan dalam bagaimana peran seharusnya Kelurahan mengenai Program Bantuan Sosial yang ada Di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita. (2006). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi, A, 2002, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Basrowi. (2014). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Cahyat, Gonner.C, Houg.M, (2007). *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga*. Bogor: Center for International Forestry Researc
- Creswell W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sunyoto. 2015. *Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (1986). *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru. Jakarta
- Moleong Lexy. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Nawawi & Martini. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ritzer, George. (2002). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Riyanto, A. (2002). *Kapita Selekt Kewirausahaan*. Bandung : Yapemdo
- Robbins, P. Stephen. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Riyanto, Y. (2002). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

## Jurnal

- Anugeraheni, C. A., & Arif, L. (2022). Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pemerataan Bantuan Sosial Pangan Kepada Masyarakat di Desa Salamwates Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7207-7215.
- Ayu, D. P. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan sosial, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(1), 170-185.
- Febriani, F., Oktavia, M., & Nuranisa, N. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH NURUL HUDA MARGOYOSO DI KELURAHAN SUNGAI SELAYUR KOTA PALEMBANG. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4775-4780.
- Hanny, H., Samsugi, S. S. S., & Sulistiyawati, A. (2023). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN DESA BERBASIS WEB (STUDI KASUS: DESA CILIMUS). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(3), 328-339.
- Harinin, M. F., Saputra, D., & Harmin, A. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Bansos Berbasis Web. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 1(2), 96-102.
- Hasan, N. F. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(1), 1-18.
- Ismoyo, D., & Enggarani, N. S. (2017). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Lubis, M. S., & Lubis, I. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Peningkatan Keterampilan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2), 1-7.
- Mufida, N. U. (2021). Efektivitas bantuan sosial tunai di kelurahan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(2), 82-92.
- Pramisita, A. A. D., & Utama, M. S. (2020). Efektivitas Dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 9(4), 780-809.
- Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaja, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 74-87.
- Tamara, Y., & Yewiwati, Y. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3), 57-62.
- Wati, H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28-42.
- Yuliantari, A. L., & Aswitari, L. P. (2018). Efektivitas dan dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kube di Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 7, 773-805.